



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**UNIT KERJA** : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : JOKO BUDI NURYANTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 722135

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	29.000.000
1. MOTOR, HONDA SPM Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp.	
10.000.000		
2. MOTOR, HONDA SPM Tahun 2020, HASIL SENDIRI	Rp.	
19.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	56.249.270
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
Sub Total	Rp.	85.249.270
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	85.249.270

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**UNIT KERJA** : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ESTI DWI UTAMI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 742767

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.784.485.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 650 m<sup>2</sup>/300 m<sup>2</sup> di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 337 m<sup>2</sup>/120 m<sup>2</sup> di KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.084.485.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m<sup>2</sup>/110 m<sup>2</sup> di KOTA SURAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 100.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 157.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 96.579.854**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 3.138.064.854**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.138.064.854

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**UNIT KERJA** : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ATIEK MACHZUNI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 736747

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 71.228.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/77 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 19.576.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/71 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 19.576.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/71 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 19.576.000
4. Tanah Seluas 120 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 4.500.000

1. MOTOR, YAMAHA SPM Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 34.800.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 110.528.000

**III. HUTANG** Rp. 56.409.851**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 54.118.149

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**UNIT KERJA** : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NUR RINA WIDAYATI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 760350

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 80.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 214 m2/80 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 115.000.000

1. MOBIL, CEVROLET CAPTIVA Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 91.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. ----

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 286.000.000

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 286.000.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**UNIT KERJA** : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ANGGIT TRIWAHYU WIDODO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 723691

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	325.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 213 m2/150 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	4.500.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	2.000.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	73.670.613
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
Sub Total	Rp.	405.170.613
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	144.590.740
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	260.579.873

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**UNIT KERJA** : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SIGIT SULISTYO BUDI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 736580

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	150.000.000
1. Tanah Seluas 100 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI	Rp.	150.000.000
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	54.500.000
1. MOTOR, HONDA SPM Tahun 2007, HASIL SENDIRI	Rp.	5.000.000
2. MOTOR, HONDA SPM Tahun 2018, HASIL SENDIRI	Rp.	19.000.000
3. MOTOR, HONDA SPM Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp.	30.500.000
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	2.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	206.500.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	54.000.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	152.500.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.